

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pemilu merupakan pesta demokrasi yang sangat-sangat di nantikan masyarakat, karena masyarakat Indonesia akan memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD-RI yang akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemilu di Indonesia sudah terlaksana pada 14 Februari 2024, dalam rangkaianannya ada masa kampanye pemilu yang berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang digelar pada 15 Februari 2024 hingga 20 Maret 2024.

Politisi selalu bersaing memperebutkan suara generasi muda pada musim pemilu. Para calon Presiden dan Wakil Presiden, dan calon legislatif akan berusaha menarik perhatian dan menyesuaikan diri dengan sifat-sifat generasi muda. Merujuk data Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih muda kurang lebih mencapai 55 hingga 60 persen atau sekitar 106.358.447 jiwa dari total daftar pemilih tetap 204.807.222 jiwa. Diantara 204.807.222 jiwa daftar pemilih tetap, ada beberapa generasi yaitu, generasi Baby Boomer, generasi X, generasi Milenial, dan generasi Z. Generasi Z banyak pemilih muda dan pemilih pemula, generasi Z juga identik dengan hal-hal baru dan terbuka terhadap isu global.

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali mendapatkan hak untuk memilih karena telah memenuhi syarat usia, yaitu 17 tahun pada hari pemungutan suara/telah memiliki KTP, dan sudah pernah menikah. Kelompok ini sering kali memiliki pemahaman politik yang masih minim dan mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang mereka terima, baik dari media sosial maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik yang intensif agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab.

Pemilih pemula cenderung masih dalam proses tumbuh dewasa, di mana mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, antusias, serta haus akan perubahan. Namun, keputusan politik mereka belum sepenuhnya stabil dan dapat berubah-ubah sesuai dengan informasi yang mereka peroleh. Kurangnya pengalaman serta rendahnya tingkat literasi politik menjadi tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Pendidikan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pemahaman yang benar mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta dampak dari pilihan politik mereka terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada pemilih pemula dan bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada mereka di Kota Jambi.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, tentang pemilih umum. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali mendapatkan hak untuk memilih karena telah memenuhi syarat usia, yaitu 17 tahun pada hari pemungutan suara/telah memiliki KTP, dan sudah pernah menikah.

Pemilih pemula adalah bagian dari yang menjadi banyak perhatian publik. Perhatian ini demikian tajam mengingat sikap apatis ditunjukkan mayoritas anak muda sejak meluasnya penggunaan media sosial. Hal ini tentu memiliki alasan yaitu secara kasat mata masyarakat melihat para kaum muda lebih asyik dengan permainan dunia maya dibandingkan dunia nyata.¹

Pemilih yang termasuk dalam kategori pemilih pemula adalah sedang dalam proses tumbuh dewasa dan menjadi dewasa. Pada tahap ini para pemilih pemula yang berusia 17 tahun yang dimana masih duduk di bangku SMA/SMK, mereka akan menyelidiki secara mendalam dan mengajukan banyak pertanyaan dalam upaya memahami rasa penasarannya. Pemilih pemula seperti anak SMA/SMK mempunyai keunikan, dimana mereka mempunyai perilaku dengan antusias tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan, tetapi keputusan pilihan yang belum bulat karena dalam menghadapi pemilu dan pilkada, pemilih pemula cenderung tidak stabil dan mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau prefensi yang melingkarinya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan banyak

¹ Wuryan, Sri dan Syaifullah. *Ilmu Kewarganegaraan (Civil)*. (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2008). Hlm.70

bantuan untuk menjelaskan hal-hal yang baik dan buruk. Banyak dari mereka yang memilih menggunakan media sosial atau internet untuk meneliti topik dan mendapatkan informasi. Informasi yang mereka terima melalui internet dan media sosial tidak lengkap dan tidak tepat, sehingga hal ini perlu dikhawatirkan. Dan perilaku pemilih pemula juga cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik menyebabkan kurangnya kesadaran dalam berpolitik, maka dari itu pemilih pemula yang berumur 17 tahun seperti anak SMA/SMK mereka membutuhkan pendidikan politik dengan harapan mereka dapat berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya.

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 April 2019 lalu melaksanakan Pemilihan Umum, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten/Kota untuk periode 2019-2024. Kemudian direncanakan untuk dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sebelumnya tanggal 09 September 2020 di ganti menjadi tanggal 09 Desember 2020, mengingat situasi pandemi Covid-19. Provinsi Jambi saat itu akan memilih Gubernur & wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 4 Kabupaten, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi. Adapun jumlah pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Kota Jambi tahun 2020 dan tahun 2024 mendatang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih Pemula Pada Pilkada Jambi Tahun 2020 dan Tahun 2024 di
Kota Jambi per-Kecamatan

No	Kecamatan	Pilkada 2020 Jumlah	Pilkada 2020 Persentase	Pilkada 2024 Jumlah	Pilkada 2024 Parsentase
1.	Alam Barajo	2.186	17,30%	3.766	17,62%
2.	Danau Sipin	1.067	8,44%	1.560	7,30%
3.	Danau Teluk	269	0,21%	458	2,14%
4.	Jambi Selatan	1.146	9,07%	1.951	9,13%
5.	Jambi Timur	1.356	10,73%	2.277	10,65%
6.	Jelutung	1.261	9,98%	1.935	9,05%
7.	Kota Baru	1.569	12,41%	2.856	13,36%
8.	Paal Merah	2.177	17,22%	3.771	17,64%
9.	Pasar Jambi	222	1,75%	382	1,78%
10.	Pelayangan	291	2,30%	428	2%
11.	Telanaipura	1.091	8,63%	1.983	9,28%
12.	Total	12.635	5,28%	21.367	4,73%

Sumber: KPU Kota Jambi Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan jumlah pemilih pemula pada Pilkada 2020 dan tahun 2024 akan datang di Kota Jambi berdasarkan data per kecamatan diatas mengalami kenaikan dari periode sebelumnya tetapi ada penurunan pada persentase, dimana keseluruhan total pemilih pemula di Kota Jambi sebanyak 12.635 pemilih pemula dari 239.162 total daftar pemilih yang ada dengan persentase 5,28%. Kemudian mengalami peningkatan dengan jumlah 21.367 pemilih pemula pada tahun 2024 yang akan datang dari total keseluruhan daftar pemilih yang ada di Kota Jambi sebanyak 451.723 dengan persentase pemilih pemula sebesar 4,73%.

Penurunan persentase ini dikarenakan total pemilih pemula yang terdaftar pada DPT KPU Kota Jambi juga di imbangi oleh kenaikan jumlah pemilih usia

umum dengan kenaikan lebih besar, yaitu dari 200.000 pemilih menjadi 400.000 pemilih. Dengan persentase tersebut pemilih pemula harus sepenuhnya menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak. Oleh sebab itu pentingnya formulasi dalam mengatasi permasalahan dalam mengamankan suara pemilih pemula agar dapat berpartisipasi pada pilkada akan datang, khususnya di Kota Jambi. Maka pemilih pemula perlu diberi pendidikan politik, agar memiliki kesadaran berpartisipasi dan berperan aktif dalam berpolitik.

Pendidikan politik ialah suatu proses pemahaman dan pembelajaran tentang kewajiban, hak, serta tanggung jawab oleh seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Terselenggaranya pendidikan politik dengan baik secara optimal dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat menjalankan kewajiban dan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Banyak orang di masyarakat tidak mampu membedakan antara politik dan campur tangan, politik dan kekuasaan, politik dan korupsi, politik dan kebohongan, dan lain-lain. Tipuan politik adalah penyebabnya, seperti yang selalu terjadi dalam masyarakat. Politik kini lebih dianggap sebagai upaya untuk memperoleh “kekuasaan” dengan cara campur tangan dan memanipulasi,

² Agung, Ilham, Asharid. *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat*. 2019.

dibandingkan sebagai cara untuk mencapai kebaikan bersama. Karena kurangnya pendidikan politik, masyarakat cenderung lebih patuh dan mudah terpengaruh untuk mendukung agenda resmi atau pribadi elit politik. Disintegrasi lokal terjadi sebagai akibat dari konflik keputusan politik di antara kelompok masyarakat dan kelompok pendukung pasangan atau kandidat tertentu. Perbedaan politik tidak diterima sebagai hal yang wajar. Selain itu, mereka tidak dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan. Pada kenyataannya, agar demokratisasi berhasil, warga negara harus terlibat dalam aktivitas politik yang independen. Partisipasi politik otonom bergantung pada masyarakat yang memiliki pendidikan politik yang cukup.

Pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya³. Secara singkat pendidikan politik bertujuan untuk membentuk kesadaran, partisipasi, dan kepribadian masyarakat baik dalam urusan berbangsa maupun bernegara.

Menurut Kartono Pendidikan Politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Dan menurut Djahiri, Pendidikan Politik adalah pendidikan atau

³ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1998), hal. 18

bimbingan, pembinaan warga Negara memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) tinggi terhadap bangsa Negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada, sedangkan Pendidikan Politik menurut Alfian adalah usaha sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.⁴

Pendidikan Politik merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang demokratis. Kota Jambi sebagai pusat aktivitas politik dan pusat pemerintahan di Provinsi Jambi, menjadi tempat strategis untuk memahami bagaimana Badan Kesatuan dan Bangsa Politik (Kesbangpol) turut serta dalam sosialisasi pendidikan Politik. Kesbangpol memiliki peran signifikan dalam membentuk pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, khususnya untuk pemilih pemula di tingkat lokal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Lembaga ini berfungsi untuk menangani urusan pemerintahan yang berkaitan dengan:

⁴<https://www.kajianpustaka.com/2020/06/pendidikan-politik.html>, Muchlisin Riadi, "Pendidikan Politik (Pengertian, Fungsi, Bentuk, dan Hambatan)", diakses pada tanggal 10 Desember 2023

1. Pembinaan ideologi Pancasila
2. Pembinaan wawasan kebangsaan
3. Pembinaan kehidupan politik di daerah
4. Pengelola dinamika masyarakat terkait dengan stabilitas politik dalam negeri
5. Fasilitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik

Di Kota Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan berdasarkan fungsi Kesbangpol di atas mempunyai tanggung jawab terhadap perpolitikan di dalam daerah. Salah satunya adalah mesosialisasikan Pendidikan Politik pada pemilih pemula. Dengan Demikian, berdasarkan tanggung jawab tersebut dengan data permulaan, bahwa Kesbangpol melakukan kegiatan “Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula” sebagai berikut:

Tabel 1.2
Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah

Program	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Tema	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula “Membangun Kesadaran Politik Bagi Pemilih Pemula Untuk Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 Jujur, Adil Dan Bermatabat”

Narasumber	1. KPU Kota Jambi 2. Bawaslu Kota Jambi	
Peserta	Nama Sekolah	Peserta
	SMA N 4 Kota Jambi	36
	SMA N 6 Kota Jambi	36
	SMA N 9 Kota Jambi	36
	SMK Islam Attaufiq Kota Jambi	36
	SMA N 13 Kota Jambi	36
	SMA N 11 Kota Jambi	36
	SMA PGRI 2 Kota Jambi	36
	Total	252
Lokasi	BPSDM Kota Jambi	
Tanggal	20 – 21 Oktoberber 2024	

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, penulis ingin mengetahui tingkat efektifitas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam memberikan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula, khususnya pada pelajar SMA di Kota Jambi.

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu kemudian membandingkannya dengan penelitian saat ini, maka penulis menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pendidikan politik. Pertama, Ilham Agung Ashariad dari Universitas Swadaya Gunung Jati Jurusan Politik Pemerintah, dalam penelitiannya berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik

Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.”⁵ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam proses penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon terdapat dua faktor penghambat yaitu; hambatan teknis yang berkaitan dengan kuantitas dari pegawai dan kualitas dari SDM perlu ditingkatkan dan hambatan non teknis yang berkaitan dengan penyusunan renstra, keterbatasan anggaran, tidak adanya silabus serta kualitas sumber daya masyarakat yang berasal dari bidang pendidikan.

Kedua, Penelitian dari Maharani, siswi Universitas Syiah Kuala Jurusan Ilmu Politik, dalam penelitiannya berjudul Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Aceh dalam Mensosialisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Aceh.⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan adalah seminar atau diskusi, baik itu melalui media massa, talkshow dan spanduk. Terdapat 3 Gerakan sosialisasi revolusi mental yakni Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih. Kegiatan sosialisasi sudah berjalan dengan baik karena kerjasama yang sangat baik dengan pihak pihak terkait, hanya saja anggaran yang minim membuat pergerakan sosialisasi terbatas. Berdasarkan dua penelitian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan**

⁵Agung, Ilham, Asharid. *Peran Badan Kesatuan Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat*. skripsi, 2019.

⁶ Andriani, R. *Strategi Political Marketing Dpd Partai Gerindra Sumbar Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Provinsi Sumatera Barat, Strategi Political Marketing Dpd Partai Gerindra*, skripsi, 2015, hlm. 1–342.

Politik Dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula Di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah tentang :

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula Di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Di Kota Jambi.
2. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi, peneliti, dan peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah bagi terselesaikannya penelitian dan dapat dijadikan bahan kajian untuk perbandingan dengan penelitian-penelitian yang mengarah pada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam sosialisasi pendidikan politik pada pemilih pemula di Kota Jambi.

2. Secara Praktis

Hal ini juga dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam memberikan pendidikan politik di masyarakat Kota Jambi. Dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyusunan program perbaikan bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam sosialisasi pendidikan politik.

1.5 Landasan Teori

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik bukan hanya sekedar gabungan dari kata pendidikan dan politik, arti dari pendidikan politik sangatlah luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seorang individu untuk mengenali dirinya sebagai manusia yang bebas dan mengembangkan statusnya sebagai warga

negara.⁷ Dalam bahasa Inggris, pendidikan politik adalah *political socialization, political education*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna sosialisasi politik.

Pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan budaya politik yang sehat, yang pada akhirnya mengarah pada munculnya masyarakat yang berpikiran terbuka dan demokratis. Politik yang sehat merupakan prasyarat terpenting bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis. Karena itu, tidak berfungsinya politik yang sehat masyarakat demokratis, atau bahkan demokrasi itu sendiri tidak akan mempunyai arah arah, kebebasan akan tidak terkendali, dan pada akhirnya akan merugikan demokrasi itu sendiri. Di sinilah sesungguhnya begitu penting pendidikan politik sebagai upaya memperkuat terwujudnya masyarakat demokratis, tentu jika dilihat dalam konteks demokrasi yang sedang kita jalani saat ini merupakan sebuah langkah maju dalam upaya reorientasi pendidikan kewarganegaraan yang sudah ada atau yang sedang berjalan.

Pendidikan politik mengacu pada segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang memengaruhi kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat (negara), guna mempelajari hak dan kewajiban kelompok tersebut. Pendidikan politik merupakan proses yang mempengaruhi individu untuk memperoleh informasi, wawasan, dan keterampilan politik sehingga dapat

⁷ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta; Pohon Cahaya, 2017), hal.

lebih kritis dan rasional dalam hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga negara yang lebih stabil, tidak melayang tanpa beban dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi atau orientasi terhadap kondisi lingkungan sekitar.⁸

Di dunia akademis, para ahli sering menganggap istilah yang sama dengan istilah sosialisasi politik karena keduanya memiliki arti yang kurang lebih sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*.⁹ Disebut “forming” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “bildung” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

Giesecke seorang ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman, mendefinisikan pendidikan politik sebagai:

- a. *Bildungswissen* yang artinya yaitu, bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri agar masyarakat dapat mengenali jati dirinya dan mempunyai keyakinan yang kuat dan dapat

⁸ Prabowo, *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*, (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), hal. 4-5

⁹ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 13

menghilangkan perasaan rendah diri dan ketergantungan pada kekuatan dan bangsa lainnya, serta memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai tolak ukur perjuangan dalam mencapai tujuan hidup berbangsa yang sejahtera;

- b. *Orientierungswissen* yang artinya berpedoman pada pemahaman humanistik yang mampu mendatangkan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan seluruh umat manusia. Secara objektif masyarakat harus berani melihat kenyataan dan siap mengubah arah situasi politik yang masih belum stabil, terutama dengan memperbaiki kelemahan dan unsur-unsur destruktif lainnya. Sehingga dapat ditemukan alternatif solusi yang baik dan masyarakat dapat menghindari jalan buntu/*impasse*, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;
- c. *Verhaltungswissen* yang artinya tindakan yang mengacu pada pemahaman terhadap undang-undang, norma, peraturan dan ketentuan yang memandu semua tindakan politik. Sehingga subjek lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menyikapi situasi politik saat ini. Cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mampu mengendalikan tindakannya berdasarkan pertimbangan yang teliti, agar masyarakat tidak berbuat salah atau menjadi egois, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesusilaan;

d. *Aktionwissen* yaitu seseorang yang dapat bertindak dengan tepat, hati-hati, dan adil, serta dengan pertimbangan yang objektif dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Introspeksi meliputi kemampuan berpikir matang dan melakukan refleksi terhadap peristiwa politik sehingga timbul wawasan reflektif dan dihasilkan ide serta tindakan yang tepat untuk mengatasi segala kesulitan¹⁰

R. Hajer mengartikan pendidikan politik sebagai upaya membentuk masyarakat menjadi peserta politik yang bertanggung jawab.¹¹ Kartini Kartono juga menyebutkan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.¹² Gabriel Almond menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk membentuk nilai politik masyarakat agar mereka berpartisipasi politik di dalamnya. Tujuannya adalah membentuk nilai-nilai politik masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara politik di dalamnya.¹³

¹⁰ *Ibid*, hal. 30

¹¹ *Ibid*, hal. 32

¹² *Ibid*, hal. 34

¹³ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahya, 2017), hal.

Dalam definisi yang lain, Dudih Sutrisman menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dan dilakukan secara sadar dalam proses transmisi budaya politik negara dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila.¹⁴ Dengan demikian, pendidikan politik diidealkan dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa definisi di atas adalah pendidikan politik diartikan sebagai pendidikan orang dewasa yang berujuan untuk menjadikan manusia menjadi individu yang cerdas, mempunyai pengetahuan tentang politik dan sadar akan hak-hak politik. Lebih lanjut, pendidikan politik bertujuan untuk memastikan bahwa partai politik mempersiapkan kade-kader terbaik untuk berjuang dan memenangkan pertarungan politik.

Selain itu, pendidikan politik adalah suatu kegiatan yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk mengembangkan masyarakat menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam pencapaian tujuan politik. Lewat pendidikan politik, orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*) disamping usaha demokratisasi struktur kemasyarakatannya. Surbakti membagi sosialisasi politik dalam dua bagian,

¹⁴ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), hal. 12

yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.¹⁵ Komunikasi dialogis antara sumber pesan dan penerima pesan menjadi ciri pendidikan politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses komunikasi konstruktif dengan pemerintah, partai politik, dan lembaga pendidikan untuk memahami, menghargai, dan menerapkan norma, nilai, dan simbol politik yang dianggap ideal dan bermanfaat. Di sisi lain, indoktrinasi politik adalah proses sepihak di mana penguasa memanipulasi dan memobilisasi masyarakat untuk mengadopsi cita-cita, standar, dan simbol-simbol yang dianggap lebih unggul dan benar oleh penguasa.

Pendidikan politik harus membawa perubahan sikap. Artinya kita harus melakukan perubahan dari sikap apatis dan negatif menjadi sikap aktif yang penuh inisiatif, progresif dan demokratis. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama dengan pemerintah membangun bangsa dan masyarakat. Selain itu terlibat dalam revitalisasi dan memberi energi pada sistem politik dan institusi masyarakat. Hal ini penting untuk memerangi sisa-sisa teknokrasi otoriter, tirani pribadi penguasa, dan birokratisasi yang terlalu ketat. Selain itu, dengan menerapkan konsep-konsep praktis, pendidikan politik dapat mendukung proses demokrasi yang lebih berkembang.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hal. 117

Pendidikan politik merupakan cara untuk menanamkan kepada warga negara pengetahuan dan nilai-nilai ideologis tentang bagaimana lembaga, peraturan, dan kebijakan pemerintah dilaksanakan, termasuk kebijakan politik dan demokrasi. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki semua orang atau sebagian besar warga negara guna untuk mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi menegakkan keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi tanggung jawab bagi untuk semua pihak, seperti pemerintah, lembaga politik, LSM, media massa serta komponen-komponen masyarakat lainnya.¹⁶

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karenanya wajar jika dimasyarakat muncul persaingan ketegangan dan konflik.¹⁷

2. Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan Politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam

¹⁶ Prabowo. *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III.*, (Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia, 2000), hal. 6

¹⁷ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hal.

bentuk yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.¹⁸

Tujuan pendidikan politik menurut Khoiron; pertama, ia menjelaskan bahwa pendidikan politik mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan perkumpulan warga masyarakat sipil. Kedua, memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, dan ekonomi demokrasi serta konstitusi Indonesia maupun negara-negara barat. Ketiga, menyemaikan komitmen yang rasional atas prinsip-prinsip dan nilai fundamental sebagaimana dituangkan dalam dokumen inti dan keempat, mempromosikan pengertian tentang peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan manusiawi di Indonesia.¹⁹

Sebagaimana dijelaskan di atas, jelas bahwa partai politik memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mendidik kader partai dan masyarakat luas mengenai pentingnya politik. Sebab, partai merupakan entitas yang mampu mengarahkan kadernya secara efektif dan berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan mendasar dari pendidikan politik adalah, untuk menunjukkan bahwa politik dan permasalahannya tidak hanya terbatas pada

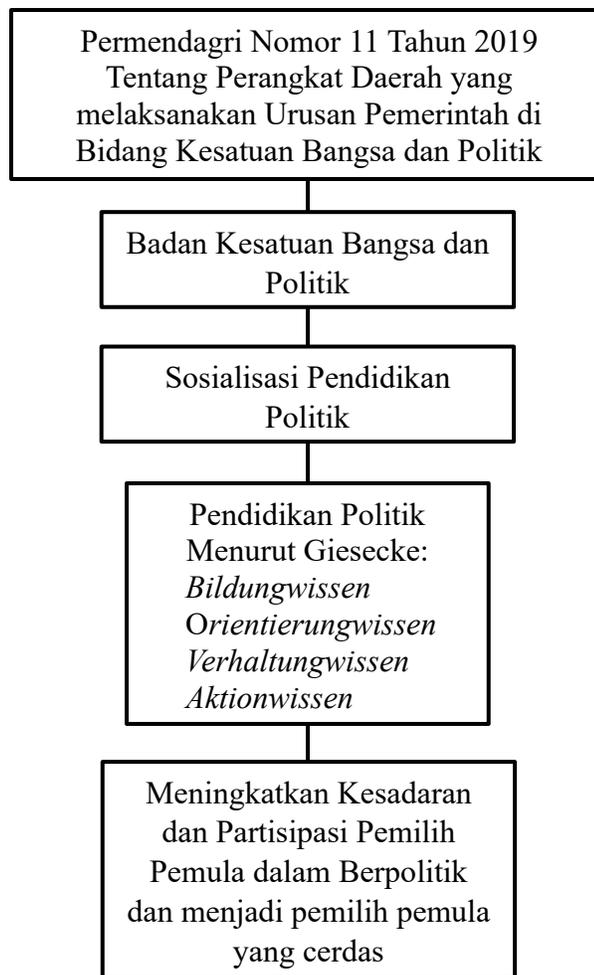
¹⁸ *Ibid*, hal. 15

¹⁹ *Ibid*, hal.16

elit politik atau mereka yang mempunyai otoritas di pemerintahan. Politik merupakan salah satu wadah pembelajaran bagi warga negara, sehingga dengan adanya pendidikan politik warga negara dapat melakukan aktivitas politik secara benar sesuai dengan asas negara tersebut.²⁰

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



²⁰ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), hal.11.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data-data yang berasal dari berbagai literatur, wawancara atau dokumentasi dilakukan kepada sumber utama terkait dengan cara menganalisis antara konsep, kebijakan dan hasil temuan dilapangan saat dilaksanakannya penelitian.

1.7.2 Lokasi/Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Yang beralamat di Lapangan Tembak, Jl. Kapt. Sujono, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi. Alasan peneliti ingin meneliti Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula, karena melihat pada pemilih pemula di Kota Jambi sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan partisipasi dalam pemilu.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian bermaksud untuk memusatkan permasalahan yang akan diteliti. Fokus tersebut dipilih berdasarkan pada kebaruan informasi yang akan dipelajari dari interaksi sosial (lapangan). Fokus penelitian yaitu memilih fokus atau pokok permasalahan untuk diteliti dan bagaimana

memfokuskannya. Oleh karenanya, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula di Kota Jambi”.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Utama (Premier)

Sumber data dapat memberikan Informasi, fakta dan situasi peristiwa dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemula di Kota Jambi.

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Sumber data dalam bentuk dokumen tertulis, dan foto. Dalam penelitian, dokumentasi dan foto merupakan sumber data sekunder.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Tambahan informan diperoleh dari informan lainnya, yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan.²¹ Misalnya saja, individu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian dalam menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti. Berdasarkan

²¹ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R dan D*. (Bandung: Alfabeta 2008). Hlm. 218.

teknik penentuan informan tersebut, maka menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Iman Bastian	Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Kota Jambi	Sebagai Kepala Bidang Politik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, untuk mengetahui partisipasi politik.
2.	Pemilih Pemula Dari 7 Sekolah Berbeda	Pemilih Pemula	Ingin mendengarkan langsung bagaimana persepsi pemilih pemula terhadap pendidikan politik.
3.	Dr. Pahrudin HM,S.S., M.A.	Pengamat Politik Jambi	Cendekiawan atau Intelektual

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, agar peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis atau alternatif jawabannya pun telah disiapkan.²²

Proses wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis berhubungan dengan penelitian.²³

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari

²² *Ibid.*, hlm.231.

²³ *Ibid.*, hlm.231.

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Metode interaktif dalam analisis data ditunjukkan melalui hal-hal berikut.²⁵

a. Reduksi

Data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran sensitif memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam hal ini dapat dilakukan adalah pengkodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya akan menyederhanakan informasi kompleks

²⁴ *Ibid.*, hlm.244.

²⁵ *Ibid.*, hlm.244.

kedalam bentuk disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi mudah dipahami. Polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validasinya.

1.7.8 Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 241.